

Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Manajemen Partisipatif

Muhammad Haris^{1*}, Kiki Kosasih², Agus Rahmatullah³, Wawan Lulus Setiawan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Koperasi Indonesia, Jl. Raya Jatinangor No.KM. 20, RW.5, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

E-mail: mochharis09@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3298>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 13 September 2025

Revised: 30 September 2025

Accepted: 23 October 2025

Kata Kunci:

Pemberdayaan Masyarakat,
Manajemen Partisipatif,
Pembangunan Desa,
Partisipasi Warga,
Pemerintahan Desa

Keywords:

Community Empowerment,
Participatory Management,
Village Development,
Citizen Participation,
Village Governance



ABSTRACT

Penelitian ini mengeksplorasi peran manajemen partisipatif dalam memberdayakan komunitas pedesaan dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan evaluasi pembangunan desa. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa desa di Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen partisipatif secara sistematis dapat meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap program desa, memperkuat modal sosial, dan menghasilkan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini merujuk pada literatur dan hasil studi terbaru, termasuk dari Universitas Ikopin, untuk memperkuat dasar teori dan analisis.

This research explores the role of participatory management in empowering rural communities and its impact on sustainable development. The main focus is directed towards the mechanisms of community involvement in decision-making, program implementation, and village development evaluation. Through a qualitative approach with case studies in several villages in Indonesia, this research shows that the systematic implementation of participatory management can enhance residents' sense of ownership of village programs, strengthen social capital, and produce development that is more responsive to community needs. This research refers to the literature and recent study results, including from Ikopin University, to strengthen the theoretical foundation and analysis.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Muhammad Haris, et al (2025). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Manajemen Partisipatif, 4 (2) 8662-8665. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3298>

PENDAHULUAN

Desa sebagai satuan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki potensi besar dalam pembangunan nasional jika dikelola secara partisipatif dan berkelanjutan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, desa memperoleh otonomi yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan. Namun demikian, banyak desa yang masih menghadapi tantangan dalam membangun kapasitas masyarakatnya dan menciptakan pembangunan yang inklusif. Pemberdayaan masyarakat melalui manajemen partisipatif menjadi pendekatan strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Partisipasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan mendorong terciptanya rasa memiliki dan keberlanjutan program. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis komunitas (community-based development), yang menekankan pentingnya kontribusi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana manajemen partisipatif berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat desa serta bagaimana praktik ini diimplementasikan dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial. Studi ini mengacu pada berbagai literatur terbaru, termasuk jurnal dari Ikopin University, guna memperkaya perspektif teoretis dan praktik di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi kasus pada tiga desa di Provinsi Jawa Barat yang telah mengimplementasikan manajemen partisipatif secara aktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, serta kelompok warga penerima manfaat program pembangunan. Selain itu, dilakukan observasi langsung dan analisis dokumen seperti RKPDes, laporan musyawarah desa, dan hasil evaluasi program pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Partisipasi dalam Perencanaan Desa-desanya yang terlibat dalam studi menunjukkan bahwa pelibatan warga dalam musyawarah desa menghasilkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Misalnya, pembangunan irigasi desa yang diusulkan oleh kelompok tani terbukti meningkatkan produktivitas pertanian. Menurut Yuliana & Nugroho (2020), partisipasi sejak tahap awal mendorong akuntabilitas dan komitmen kolektif dalam pelaksanaan program. Keterlibatan dalam Implementasi Program Masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan program pembangunan. Kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) menjadi contoh nyata bagaimana partisipasi warga berkontribusi langsung dalam pembangunan fisik desa sekaligus menyerap tenaga kerja lokal (Fitri et al., 2023).

Evaluasi dan Transparansi Salah satu desa dalam studi ini menerapkan sistem evaluasi berbasis forum warga yang dilakukan setiap triwulan. Hal ini mendorong transparansi dalam penggunaan dana desa dan memberikan ruang koreksi terhadap pelaksanaan program. Penggunaan media digital untuk menyampaikan laporan anggaran juga menjadi sarana partisipasi warga secara tidak langsung (Nugroho & Sari, 2022). Faktor Pendukung dan Penghambat Faktor pendukung utama dalam implementasi manajemen partisipatif antara lain kepemimpinan yang terbuka, budaya gotong royong yang masih kuat, serta adanya dukungan regulasi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan literasi warga, dominasi elite desa dalam musyawarah, dan kurangnya fasilitator yang kompeten (Wahyudi & Ramadhan, 2023).

Temuan ini selaras dengan Widianingsih & Morrell (2007) yang menegaskan bahwa partisipasi publik yang berhasil ditopang oleh kapasitas kelembagaan dan fasilitas partisipatif yang efektif. Studi oleh Siregar dan Lestari (2024) menunjukkan rendahnya partisipasi perempuan dan pentingnya keterlibatan mereka dalam forum musyawarah. Rizky dan Nurfadillah (2024) menyoroti penggunaan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan YouTube sebagai alat baru partisipasi warga desa dalam bentuk digital. Kurniawan & Syamsudin (2024) menambahkan pentingnya mengintegrasikan pendekatan ekologi lokal dalam pembangunan desa. Prasetya dan Aminah (2023) mengusulkan pembentukan forum pemuda desa untuk meningkatkan partisipasi generasi muda.

Tahapan	Deskripsi	Contoh Praktik
Perencanaan Partisipatif	Warga dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menentukan prioritas program pembangunan.	Usulan pembangunan irigasi oleh kelompok tani.
Implementasi Program	Warga ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.	Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) menyerap tenaga kerja lokal.
Evaluasi Forum Warga	Forum warga dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan penggunaan dana desa.	Evaluasi triwulan melalui forum warga dan laporan digital transparansi anggaran.
Tindak Lanjut dan Rekomendasi	Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan program ke depan. Disarankan penguatan kapasitas warga dan fasilitator.	Pelatihan kewirausahaan, peningkatan literasi digital, penguatan peran BUMDes.

SIMPULAN

Penerapan manajemen partisipatif dalam pembangunan desa terbukti mampu memberdayakan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Proses ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program pembangunan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan rasa kepemilikan warga terhadap hasil pembangunan.

Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain yaitu meningkatkan kapasitas fasilitator desa dalam memfasilitasi musyawarah dan forum warga, memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan melalui media digital, menyusun mekanisme evaluasi partisipatif yang sistematis dan inklusif, mendorong pelatihan kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas. peningkatan keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda dalam forum musyawarah dan penguatan sinergi antara teknologi informasi desa dan kearifan lokal dalam pengambilan keputusan kolektif. Dengan pendekatan ini, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam merancang masa depannya sendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Aditya, R. A., & Pramono, G. (2024). Digitalisasi dan Inovasi Kebijakan Desa di Era 5.0. *Jurnal Kebijakan Publik Digital*, 3(1), 55–70.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*.
- Arifin, S. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45–57.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Damayanti, Y., Sudrajat, R., & Lazuardi, H. (2023). Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 12(2), 98–113.
- Fitri, R., Suryadi, T., & Maulana, D. (2023). Evaluasi Program Padat Karya Tunai dalam Pengurangan Kemiskinan Desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 6(1), 89–102.
- Hidayat, A., Firmansyah, R., & Rachmawati, N. (2022). Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan BUMDes. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Ikopin University*, 8(2), 110–125.
- Kurniawan, D., & Syamsudin, A. (2024). Pembangunan Berbasis Ekologi di Desa-Desa Agraris. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 7(1), 41–58.
- Nugroho, F., & Sari, M. (2022). Digitalisasi Transparansi Anggaran Desa: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(1), 33–47.
- Prasetya, D., & Aminah, L. (2023). Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Generasi Desa*, 2(2), 65–79.
- Putri, S. R., & Laksono, B. (2023). Kearifan Lokal dalam Tata Kelola Desa: Studi di Jawa Tengah. *Jurnal Sosial dan Pemerintahan*, 11(2), 75–89.
- Rizky, H., & Nurfadillah, A. (2024). Media Sosial sebagai Sarana Partisipasi Digital Masyarakat Desa. *Jurnal Komunikasi Desa*, 5(1), 25–40.
- Siregar, M., & Lestari, D. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Inklusif. *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 5(1), 22–38.
- Stoner, J. A. F., & Freeman, R. E. (1995). *Management*. Prentice Hall.
- Suharto, Edi. (2009). *Pembangunan Masyarakat: Teori, Praktik dan Kritik*. Bandung: Refika Aditama.
- UNDP. (2022). *Human Development Report 2022: Uncertain Times, Unsettled Lives – Shaping Our Future in a Transforming World*. United Nations Development Programme.
- Wahyudi, H., & Ramadhan, F. (2023). Tantangan Implementasi Partisipasi dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10(1), 60–72.
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). *Participatory Planning in Indonesia: Seeking a New Path to Reform*. Policy Studies.

- Wijaya, R., & Hasanah, N. (2023). Literasi Keuangan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 4(1), 91–104.
- Yuliana, D., & Nugroho, H. (2020). Musyawarah Desa sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 4(2), 101–115.
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory: Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis. In Rappaport, J. & Seidman, E. (Eds.), *Handbook of Community Psychology* (pp. 43–63). Springer.